



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 19**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 19 TAHUN 2005**

(Perda No. 19 Tahun 2005 Tgl. 26-Nov-2005, LD. No. 19 Tahun 2005 Tgl. 31-Nov-2005)

### **T E N T A N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapai target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 19 November 2005 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 108);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68, TLN Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44, TLN Nomor 3688 );
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (LN Tahun 2000 Nomor 206, TLN. Nomor 3952 );
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. Tahun 2003 Nomor 47, TLN. Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 54, TLN. Nomor 4389 );

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LN. Tahun 2001 Nomor 157, TLN. Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202, TLN. Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 204, TLN. Nomor 4024 );
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 209, TLN. Nomor 4027 );
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 210, TLN. Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118, TLN. Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 90, TLN. Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
2. Pokok-pokok pikiran dan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci terhadap Penyusunan Rancangan Nota Keuangan

dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci ;

3. Risalah Sidang–sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI  
DAN  
BUPATI KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 256.268.790.732.02 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 15.258.213.093.98 sehingga menjadi Rp. 271.527.003.826,- dengan perincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula                           | Rp. 256.268.790.732.02       |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 15.258.213.093.98</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp. 271.527.003.826,-</u> |

## 2. Belanja

a. Semula	Rp. 259.491.293.299,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.758.793.226,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 274.250.086.525,-</u>
Surplus/Defisit Anggaran	(Rp. 2.723.082.699,-)

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 14.847.502.566.98
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.555.992.030.32</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.16.403.494.597.30</u>
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 11.625.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.055.411.898.30</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 13.680.411.898.30</u>
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.723.082.699,-</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V Daftar Investasi ( Pernyataan Modal Daerah )
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang/Pinjaman Daerah
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun yang Lalu ;
9. Lampiran IX Daftar Aktiva Tetap Daerah dan ;

### **Pasal 3**

Lampiran–lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada tanggal : 26 November 2005

**BUPATI KERINCI**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**